



Peringatan HUT Ke-68 BPK RI
BPK Harus Berperan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bandung – Hukum Humas

Berdasarkan amanah Pasal 23E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK ditugaskan dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga keuangan negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua BPK, **Harry Azhar Azis**, dalam pidato upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-68 BPK.

Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku Inspektur Upacara, Cornell S. Prawiradiningrat, membacakan pidato Ketua BPK tersebut pada saat upacara HUT Ke-68 BPK di halaman Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kamis, 15 Januari 2015.

“Namun demikian, harapan peningkatan kemakmuran rakyat tersebut masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan, garis kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, kesenjangan pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih tinggi”, jelas Harry.

Harry menambahkan bahwa salah satu faktor penyebab terhambatnya pembangunan adalah korupsi. Praktik korupsi memberikan dampak luar biasa bagi pertumbuhan suatu negara. Hal tersebut diperkuat oleh kalangan ekonom yang menyatakan bahwa korupsi merupakan penghambat utama pembangunan.

“Korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan dipercaya memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan”, urai Harry.

Menurut Harry, saat ini keuangan negara belum sepenuhnya dikelola secara baik dan benar untuk mensejahterakan rakyat. BPK yang mendapat amanah dari para pendiri bangsa akan sangat disalahkan jika tidak peduli dengan permasalahan tersebut. BPK akan ikut berdosa jika membiarkan APBN/APBD tidak digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

“BPK harus memberikan perhatian dan prioritas dalam pemeriksaannya pada program-program yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Termasuk, BPK harus memberikan perhatian besar pada pemeriksaan atas program-program yang menguasai hajat hidup orang banyak dan rawan terjadi korupsi. Dengan cara demikian, akan terlihat dengan jelas korelasi pemeriksaan BPK dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat”, kata Harry.

Dalam kesempatan tersebut, Harry menjelaskan bahwa saat ini BPK sedang menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2016 s.d. 2020. Strategi yang ditempuh BPK dalam lima tahun ke depan adalah BPK meningkatkan perhatian pada pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja tersebut difokuskan pada program-program yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Khususnya yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Pemerintah tahun 2015-2019. Dengan demikian, selain BPK memberikan penilaian atas laporan keuangan, pada saat yang sama BPK juga memberikan penilaian atas upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BPK diharapkan dapat membuat kebijakan pemeriksaan atau rencana strategis dengan fokus kepada program-program penciptaan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan lain-lain. Hal tersebut menjadi penting karena program-program tersebut langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat sehingga hasil pemeriksaan BPK dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Jika hasil pemeriksaan BPK dirasakan dampaknya oleh masyarakat maka BPK akan menjadi lembaga yang dibutuhkan dan diharapkan kehadirannya oleh masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan standar yang berlaku di kalangan BPK sedunia yaitu *International Standard for Supreme Audit Institutions* (ISSAI). ISSAI Nomor 12, antara lain, menetapkan bahwa lembaga pemeriksa akan memiliki nilai dan manfaat jika mampu menjaga relevansi kegiatannya dengan kebutuhan masyarakat/stakeholders.

Mengakhiri pidatonya, Harry berpesan kepada seluruh jajaran di BPK untuk selalu menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalisme. BPK dapat berdiri tegak karena lembaga ini menjunjung tinggi kredibilitas organisasi dan kepercayaan masyarakat. BPK tidak boleh menjadi sosok yang berdiri di menara gading, tetapi hasil pemeriksaan BPK harus menyentuh kepentingan masyarakat. (***)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Contact Person:

Novie Irawati Herni Purnama
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jln. Moch. Toha No.164 Bandung, Jawa Barat
Telp. (022) 5207294, Fax. (022) 5207898; e-mail : humasbpk_bdg@yahoo.co.id